

---

# Transformasi Sektor Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Kajian Persepsi Auditor terhadap Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung)

Marheni<sup>1</sup>, Yunita<sup>2</sup>, Robby Irwansyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

<sup>2</sup>STIE IBEK Pangkalpinang, Indonesia

<sup>3</sup>BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Correspondence email: [marheni.utama@gmail.com](mailto:marheni.utama@gmail.com)

---

Received: 06-05-2023/Accepted: 21-07-2023/ Doi: <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3421>

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial transformation with HR competence on the financial quality of the Kepulauan Bangka Belitung Government SKPD based on the auditor's perception. This is studied by analyzing the influence of HR competence on the perception of the quality of financial reports produced by the financial report manager of the Kepulauan Bangka Belitung Province SKPD. This research is explanatory research. The population in this study were 50 people in Kepulauan Bangka Belitung Province. Financial auditors conduct employee assessments in finance and planning as SKPD financial report makers. Data analysis techniques using SEM. The results showed that based on the auditor's perception, knowledge had a significant effect on the perception of the quality of financial statements. Expertise has no significant effect on perceived quality of financial statements. Attitude has a significant effect on the perception of the quality of financial statements. Based on the results of the HR competency test consisting of knowledge and attitudes that affect the perception of the quality of the SKPD's financial reports. Meanwhile, expertise/skills have no significant effect on the perception of the quality of financial reports.*

**Keywords:** *transformation, financial, competency, HRD and quality of financial reporting*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi keuangan dengan kompetensi SDM terhadap kualitas keuangan SKPD Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan persepsi auditor. Hal ini dikaji dengan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap persepsi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian *penjelasan*. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Auditor keuangan melakukan penilaian pegawai bidang keuangan dan perencanaan sebagai pembuat laporan keuangan SKPD. Teknik analisis data menggunakan SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi auditor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Sikap berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji kompetensi SDM yang terdiri dari pengetahuan dan sikap yang berpengaruh terhadap persepsi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Sedangkan keahlian/keterampilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** transformasi, keuangan, kompetensi, HRD dan kualitas laporan keuangan

---

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sebuah produk akuntansi sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Windiyastuti, 2013). Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam organisasi pemerintahan karena menjadi komponen yang mampu menggerakkan seluruh aktivitas pemerintahan. Organisasi pemerintahan tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia dan kualitas yang memadai menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah perlu secara serius menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah (Rovieyanti, 2018).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hetanti (2013) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Ropiyantie (2012) dan Jannaini (2012) menemukan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap persepsi kualitas laporan keuangan daerah. Bastian (2006:55), Rovieyanti (2011) dan Zeyn (2011) juga menegaskan bahwa kompetensi SDM aparatur dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan Kovvina dan Betri (2014) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan berbagai tulisan yang berhasil di-*download* dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Fenomena yang terjadi masih banyaknya laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

BPK melakukan penelitian pada enam kementerian negara/lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran umum kekuatan dan kelemahan SDM pemerintah dalam mengimplementasikan keuangan negara pada tahun 2004-2008 (5 tahun). Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi berikut: (1) kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara, khususnya yang berlatar belakang akuntansi; (2) penempatan SDM yang keliru; (3) tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah; (4) *reward system* yang belum tepat; (5) sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu. Atas permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen dari seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara

([www.star.bpkp.go.id](http://www.star.bpkp.go.id)).

Adanya berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan, tenaga akuntan yang handal sangat dibutuhkan pada sektor publik baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai penentu kebijakan. Hasil penelitian BPK menunjukkan adanya masalah SDM pemerintah pusat dan daerah. Masalah pertama yang terdeteksi dalam penelitian BPK tersebut berkaitan dengan alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan. Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebesar 76,77%, unit pengelola keuangan negara diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi. Instansi yang disurvei mengemukakan alasan-alasan terkait dengan permasalahan di atas, yaitu (1) tidak memiliki atau kekurangan SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi; (2) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; (3) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan; (4) adanya kebijakan pimpinan; dan (5) pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut dirubah/direvisi untuk disesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat ([www.star.bpkp.go.id](http://www.star.bpkp.go.id)).

Tujuan penelitian antara lain 1) Menganalisis pengaruh kompetensi SDM berupa pengetahuan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2) Menganalisis pengaruh kompetensi SDM berupa keahlian terhadap persepsi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3) Menganalisis pengaruh kompetensi SDM berupa sikap/*attitude* terhadap persepsi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola laporan keuangan SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Keagenan

Pemahaman *good corporate governance* menggunakan dasar perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976). Lane (2000:31) menyatakan bahwa hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak antara keduanya.

Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu (a) asumsi tentang sifat manusia; (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas. Asimetri informasi (*asymmetric information*), merupakan informasi

yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi antara prinsipal dan agen (Giraldi, 2001).

Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Abdullah, 2012). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* (Jensen and Meckling, 1976) dalam Abdullah (2012).

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

*Good Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Good Corporate Governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Dengan kata lain yakni *Good corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut Rahmawati dalam Putri (2006) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability dan responsibility* yang mengatur hubungan antar pemegang saham, manajemen, Direksi dan Komisaris, kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelaksanaan *good corporate governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance*. Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2011).

## 2. Hubungan Keagenan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah diinterpretasikan dalam 2 (dua) hubungan yaitu:

### a. Hubungan rakyat sebagai prinsipal dan kepala daerah sebagai agen

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur,

bupati/walikota). Pemerintah daerah juga menerima pelimpahan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku agen terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. DPRD yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku prinsipal adalah pengembalian fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi ini sesuai dengan pendapat Lane (2002:81) dan Petrie (2002) yang menyatakan bahwa prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan berbagai program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

b. Hubungan kepala daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPD sebagai agen

Hubungan kepala daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPD sebagai agen tercermin dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran (PA) atau pengguna barang daerah. Kedudukan kepala SKPD dan PPKD adalah menerima wewenang dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku prinsipal wajib melaksanakan sistem kontrol melalui SPI untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD serta penatausahaan atas pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Kepala SKPD dan PPKD selaku agen wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang telah diterimanya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Wujud tanggung jawab adalah dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Kepala SKPD selaku PA menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan melalui PPKD dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah melalui PPKD. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Gilardi (2011) mengemukakan bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu bentuk hubungan pendelegasian (*chains of delegation*). Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang/prinsipal memilih orang atau kelompok lain/agen untuk melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia dan McCubbins, 2017).

## METODOLOGI

### a. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *explanatory*. Penelitian dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penilaian 50 auditor keuangan. Adapun waktu penelitian adalah dari tanggal 2 Juni 2022 s/d 2 Juli 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah 102 pegawai bagian keuangan yang mendapatkan penilaian dari auditor keuangan sebanyak 50 orang. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling* atau SEM) dengan menggunakan paket program AMOS (*Analysis of Moment Structure*) versi 18 dan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) for Window versi 18.

## b. Sampling

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yaitu penentuan sampel dengan menggunakan seluruh populasi (Sugiyono, 2015:54). Sampel penelitian adalah 102 orang PNS di bidang keuangan dan perencanaan selaku pembuat laporan keuangan SKPD. Teknik pengukuran data yang diperoleh diukur dengan menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi asumsi SEM ini dibedakan atas empat macam, yaitu: ukuran sampel, uji *outliers*, uji normalitas dan uji multikolinieritas.

### 1. Ukuran Sampel

Permodelan SEM memiliki ukuran sampel yang harus dipenuhi ada dua macam, yaitu: pertama, antara 100-200 sampel (Hair *et al.*, 2018), atau kedua, menggunakan perbandingan 21 observasi untuk setiap *estimated* parameter. Dengan jumlah sampel sebanyak 102 pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka sampel dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi tentang jumlah sampel.

### 2. Hasil Uji *Outlier*

Uji outlier merupakan penelusuran data yang ekstrim yang berbeda dengan pengamatan data lainnya, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi (Hair *et al.*, 2018:321). Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara univariat maupun secara multivariat yaitu muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimiliki dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya. Apabila terjadi outliers dapat dilakukan perlakuan khusus pada outlier-nya asal diketahui bagaimana munculnya outliers tersebut. Deteksi terhadap multivariate outlier dilakukan dengan memperhatikan nilai Mahalanobis distance. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan nilai *Chi Squares* pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar jumlah variabel indikator pada tingkat signifikansi  $p < 0,05$  (Ghozali, 2018: 185).

Hasil uji *outliers* pada penelitian nampak pada *Mahalanobis distance* atau *Mahalanobis d-squared*. Untuk menghitung nilai *Mahalanobis distance* berdasarkan nilai *Chi squares* pada derajat bebas 102 (jumlah variabel indikator) pada tingkat  $p < 0,05$  ( $\chi^2_{0,05}$ ) adalah sebesar 32,670 (berdasarkan Tabel distribusi  $\chi^2$ ). Jadi data yang memiliki jarak *Mahalanobis distance* lebih besar dari 32,670 adalah *multivariate outlier*. Hasil uji *outlier* menunjukkan bahwa tidak ada satupun kasus yang memiliki nilai *Mahalanobis distance* lebih besar dari 46,194 maka dapat disimpulkan tidak ada *multivariate outlier* dalam data penelitian.

### 3. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur kenormalan data secara univariat maupun multivariat. Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan menghitung statistik-z untuk *skewness* dan kurtosis data, yaitu dilihat dari *Critical Ratio (CR)* dalam *assessment of normality*. Pada  $\alpha = 5,00$ , jika nilai CR berada nilai *critical ratio* di bawah nilai absolut  $\pm 1,96$  data tersebut berdistribusi normal, secara univariat atau multivariat (Ghozali, 2018:128). Data variabel-variabel penelitian, seluruhnya memiliki nilai *critical ratio* di antara -1,96 sampai +1,96. Ini membuktikan tidak terjadi pelanggaran asumsi normalitas SEM pada input data penelitian ini.

### 4. Multikolinieritas

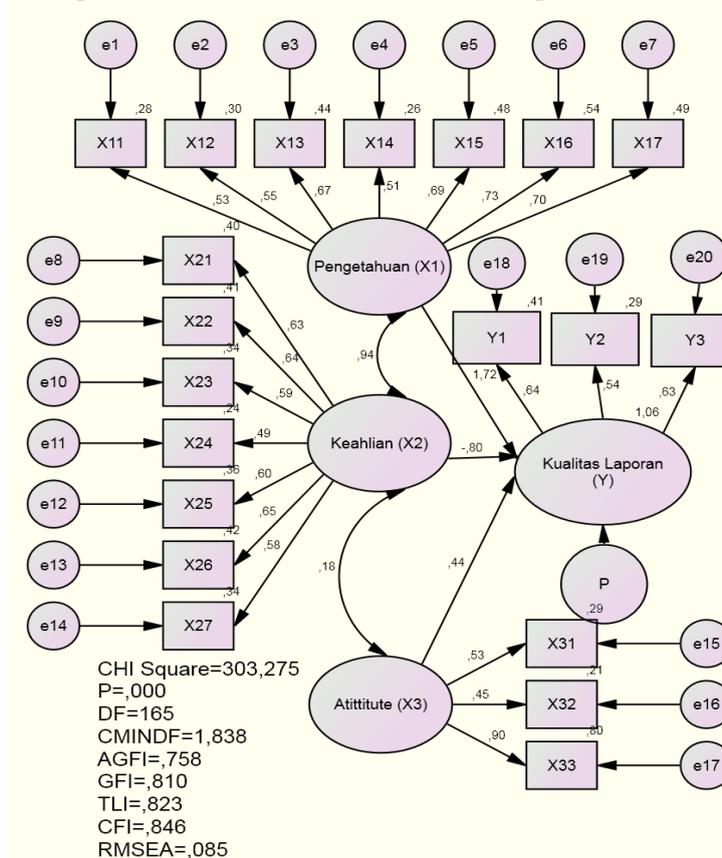
Gejala multikolinieritas dapat diindikasikan dari determinan matriks varians-kovarians data variabel eksogen. Nilai determinan yang kecil mengindikasikan adanya gejala multikolinieritas. Jika hal itu terjadi, maka data itu tidak dapat digunakan untuk penelitian (Ghozali, 2018:230). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai determinan matriks varians-kovarians = 0,121. Nilai ini relatif besar, dan dapat digunakan sebagai ukuran indikasi bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel eksogen.

Hasil *Structural Equation Modelling* (SEM)

1. Uji Kelayakan Model dengan *Goodness of Fit Indices*

Berdasarkan cara penentuan nilai dalam model, maka variabel pengujian model pertama ini dikelompokkan menjadi variabel eksogen (*exogenous variabel*) dan variabel endogen (*endogenous variabel*). Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan melalui persamaan atau dari model hubungan yang dibentuk, termasuk dalam kelompok variabel eksogen adalah pengetahuan (X1), keahlian (X2), *attitude* (X3) dan variabel endogen kualitas laporan keuangan (Y).

Model dikatakan baik bilamana pengembangan model hipotesis secara teoritis didukung oleh data empirik. Model awal SEM dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model SEM

Berdasarkan dapat diketahui bahwa model layak digunakan dengan mengamsumsikan prinsip *Parsemony* memenuhi kriteria karena sudah ada lebih dari satu memenuhi sehingga model ini layak digunakan.

Evaluasi model menunjukkan dari delapan kriteria *goodness of fit indices* semua sudah memenuhi kriteria dan sudah mendekati nilai kritis yang disarankan. Dengan demikian, merujuk pada prinsip *parsimony*, model secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan data dan dapat di analisis lebih lanjut.

2. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan struktural. Hasil uji hipotesis dengan melihat nilai *p value*. Jika nilai *p value* lebih kecil dari 0,05 maka hubungan antar variabel signifikan.

Setelah diketahui bahwa model dalam analisis ini telah fit maka analisis selanjutnya

adalah mengetahui tingkat hubungan dan signifikansi atau kebermaknaan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil pengujian dengan program AMOS memberikan hasil model persamaan struktural yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel pengetahuan dengan kualitas laporan keuangan, keahlian dengan kualitas laporan keuangan, *attitude* dengan motivasi kerja, dan motivasi kerja dengan kualitas laporan keuangan.

Hipotesis pertama dan kedua menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil analisis yang ada ternyata nilai koefisien jalur pengetahuan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,012 dengan nilai C.R 2,009. Nilai C.R ini lebih besar dari nilai kritis yang disyaratkan sebesar 2. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini mendukung (menerima) hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa keahlian berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keahlian memiliki nilai koefisien jalur dengan kualitas sebesar 0,316 dengan nilai C.R sebesar 0,521. Nilai C.R ini lebih kecil dari nilai C.R yang disyaratkan yakni sebesar 2. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini menolak hipotesis kedua yang menyatakan keahlian berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa sikap perilaku (*attitude*) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil analisis yang ada ternyata nilai koefisien jalur sikap perilaku (*attitude*) terhadap persepsi kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,444 dengan nilai C.R 2,621. Nilai C.R ini lebih besar dari nilai kritis yang disyaratkan sebesar 2. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sikap perilaku (*attitude*) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan *attitude* berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

### 3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Dalam persamaan struktural yang melibatkan banyak variabel dan jalur antar variabel terdapat pengaruh antar variabel . Hubungan langsung terjadi antara variabel laten eksogen pengetahuan, keahlian dan *attitude* dan variabel endogen kualitas laporan keuangan. Hasil pengaruh langsung mengenai hubungan langsung yang terjadi diantara variabel-variabel laten eksogen dan endogen.

Berdasarkan dapat dijelaskan besar pengaruh langsung dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Terdapat tiga efek langsung pada kualitas laporan keuangan (Y), yakni pengetahuan (X1), keahlian (X2) dan *attitude* (X3). Efek langsung yang terbesar pada kualitas laporan keuangan (Y) adalah pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel laten tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil rangkuman pengujian dijelaskan bahwa pengaruh langsung motivasi kerja terhadap persepsi kualitas laporan keuangan memiliki nilai koefisien jalur paling besar jika

dibandingkan dengan koefisien jalur pengaruh langsung pengetahuan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat dibahas sebagai berikut.

a. a. Pengaruh Pengetahuan (*Knowledge*) terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan (*knowledge*) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan (*knowledge*) maka persepsi kualitas laporan keuangan SKPD semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD, terbukti.

Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai, terlebih pengetahuan dalam bidang akuntansi dan auditing. Pengetahuan merupakan suatu dasar yang penting yang menjadi modal selama bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Pengetahuan seorang pegawai bagian keuangan pemerintah daerah mendukung kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Implementasi hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak aparat, akan tetapi tingkat kualitas atau SDM masih minim. Ini dapat dilihat pada adanya pegawai yang berkinerja baik, tapi tidak memenuhi syarat dari sisi kepangkatan dan pertimbangan teknis kepegawaian. Serta sebaliknya ada aparat yang telah memenuhi syarat kepangkatan, namun tak dibarengi dengan kompetensi yang memadai. Untuk itu pemerintah diupayakan melakukan kegiatan seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada pegawainya. Peranan pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah sangatlah penting, karena pegawai merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dan program-program yang disusun pemerintah secara langsung. Pegawai harus secara langsung ikut dalam proses penyusunan anggaran, karena mereka yang nantinya akan menjalankan kegiatan dan program yang telah dianggarkan tersebut.

Pengetahuan adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengetahuan yang tinggi dan luas juga dapat mempengaruhi kualitas audit sehingga pengetahuan menunjang pegawai bagian keuangan melakukan tugas secara optimal. Hasil ini konsisten dengan Ihsanti (2014) dan Nugraha, dkk (2010) menemukan bahwa pengetahuan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pegawai akuntansi atau keuangan.

b. b. Pengaruh Keahlian/keterampilan (*Skills*) terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Keahlian/keterampilan sumber daya manusia merupakan kemampuan dalam hal pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keahlian/keterampilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa semakin baik Hasil pengujian menunjukkan bahwa keahlian belum tentu dapat meningkatkan persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD, ditolak.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan Andriani (2010) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap persepsi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja. Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualitas dari laporan yang akan mereka susun. Kualitas sebuah laporan keuangan merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah kualitas dari neraca dalam laporan keuangan. Laporan barang kuasa

pengguna memberikan sumbangan informasi yang signifikan dalam neraca laporan keuangan kementerian/lembaga.

c. c. Pengaruh Sikap Perilaku (*Attitude*) terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap perilaku (*Attitude*) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD. Hal itu menunjukkan bahwa semakin baik sikap perilaku pegawai bagian keuangan maka kualitas laporan juga akan semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu sikap perilaku (*Attitude*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan SKPD, ditolak.

Sikap perilaku mempunyai peran yang sangat penting karena dengan perilaku diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman dibidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Impelementasi hasil penelitian menunjukka bahwa perilaku oportunistik penyusun laporan keuangan dapat dilihat dari peningkatan alokasi belanja pada sektor tertentu yang termasuk perilaku disfungsional yang timbul pada penganggaran. Hasil ini sesuai dengan Elias (2013) menyebutkan bahwa perilaku oportunistik akan mendorong individu berperilaku tidak etis untuk meningkatkan *self interestnya*.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kompetensi SDM berupa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Apabila pengetahuan dilakukan sesuai prosedur maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat.
- b. Kompetensi SDM berupa keahlian berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas laporan keuangan. Keahlian dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- c. Kompetensi SDM berupa sikap perilaku (*attitude*) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sikap perilaku (*attitude*) yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Implikasi penelitian dijelaskan dengan adanya tranformasi keuangan daerah yang dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM dari kemampuan pegawai khususnya peningkatan kualitas keuangan. Saran yang dapat diberikan bagi intansi dan peneliti selanjutnya yaitu a) Para pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keahlian dengan jalan tidak mengabaikan hak dan kepentingan pegawai yang bersangkutan. Seperti, memberikan kesempatan promosi, perbaikan sistem pengawasan pegawai, meningkatkan kemampuan sehingga dorongan pada pegawai dapat memacu kualitas laporan keuangan; b) Penelitian selajutnya dapat mengukur variabel dengan persepsi yang lain, terutama persepsi atasan (*supervisor* atau *manager*), dengan tujuan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kualitas laporan keuangan untuk perbaikan manajemen selanjutnya dan c) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain, sebagai variabel kompetensi dan dilakukan dengan perbandingan di Kementerian Keuangan dan yang lainnya.

**REFERENSI**

- Abdullah, H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah. S dan Asmara, J.A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang.
- Adhi, Daniel kartika dan Yohanes Suhardjo. (2011). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)". *JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)*
- Andriani, Wiwik. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No. 1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 68-90.*
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Betri, K. (2014). Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di kota Palembang). Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Beyrne, R. (1998). *The competent manager : a model for effective performance*. New York : John Wiley and sons. ISBN: 047109031X
- Castel Nicholas G. (1999). Quality Improvement and Top Management in Nursing Homes. *Journal of Quality Management. Volume 4. No. 1 Pg 95-109. Elseiver Science Inc. New York.*
- Davenport and Prusak. (1998). The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004
- Gilardi, F. (2011). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK). 6-8 September 2001*
- Khandekar dan Dharma. (2016). Reformasi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Daya Saing. Volume 1. Nomor 1 hal. 42-47. Jakarta.*
- Lane, J.E. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Lupia, A. dan McCubbin, M. (2000). Representatif or abdication? How citizen use institution to help delegation succeed. *European Journal of Political Research 37: 291-307.*
- Roviyanti, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal SNA. Vol.4 No.2 hal. 12-19*
- Yeni, Ani. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi dan Kinerja. *Jurnal Manajemen Daya Saing. Volume 4. Nomor 2. hal. 42-47. Jakarta.*